

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Ditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiono, Harlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Herry, Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Centre for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Notonegoro, 1984, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- H.S, Salim, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

Thamrin, H. Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### **3. Jurnal/Makalah/Tesis**

Yulianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Studi Kasus di Kota Makassar)", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Sarjita, Yahman, "Eksistensi Hak Prioritas Hak Atas Tanah Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah", *Laporan Penelitian Strategis*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2015.

### **4. Internet**

Syafran Sofyan, "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Tanah", <http://www.medianotariat.com>, diunduh pada tanggal 02 Oktober 2015 pukul 21.30 WIB.

Diah Sulistyani, "Status Kepemilikan Hak Berakhirnya Tanah Hak Guna Bangunan", [www.medianotariat.com](http://www.medianotariat.com), diunduh pada tanggal 02 Oktober 2015 pukul 21.30 WIB.